

**PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Izhartati

NPM. 1351010253

Jurusan : Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1439 H/2017 M

**PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh

IZHARTATI

NPM. 1351010253

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Pembimbing II : Budimansyah, M.Kom.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2017 M

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Angkatan kerja di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun semakin bertambah sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas jumlahnya, sehingga tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung, dimana pada tahun 2015 mencapai 8,51%. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Usaha dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat upah.

Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015 dan bagaimana penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015 dan penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2006-2015. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk data Penduduk 15+ yang Bekerja, Investasi dan Upah Minimum yang diperoleh dari BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial (Uji T) investasi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Serta secara Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel investasi dan upah minimum tidak ada pengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung disebabkan karena investasi di Kota Bandar Lampung lebih banyak disalurkan ke sektor proyek yang padat modal (jasa) dibandingkan ke sektor proyek yang padat karya, dimana dalam sektor proyek yang padat modal hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Sedangkan tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung disebabkan karena penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung sebagian besar telah menerima upah yang relatif tinggi atau melebihi upah minimum. Penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam adalah pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya sebagai tanggung jawabnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya.



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Izhartati**

NPM : **1351010253**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Oktober 2017

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

Pembimbing II

Budimansyah, M.Kom.I.
NIP. 197707252002121001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

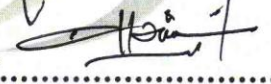
Skripsi dengan judul : **PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.** Oleh: **IZHARTATI, NPM. 1351010253,** Jurusan: **EKONOMI SYARIAH,** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : **Rabu, 08 November 2017**

TIM PENGUJI

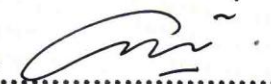
Ketua sidang : Hanif, S.E., M.M.

(.....)

Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd.

(.....)

Penguji I : Erike Anggraini, D.B.A.

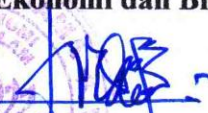
(.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

(.....)

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Moh. Bahrudin., M.A.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS.At-Taubah:105)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.273

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Masri dan Ibu Hargianti, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktu ku menuntut ilmu.
2. Kedua kakak ku Dimas Kurniawan dan Pramudya Irawan, serta adik ku Yoga Fathasri yang tiada hentinya memberikan dukungan baik materi maupun spiritual, memberikan contoh sikap teladan dan disiplin juga mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan yang dituju dan berkat inspirasi yang kalian berikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus. Engkaulah sang pejuang sejati.
4. Teman-teman seperjuanganku di kelas Ekonomi Syariah B dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Ekonomi Syariah angkatan 2013.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Izhartati dilahirkan di Desa Pandansari, pada tanggal 15 Juni 1995 yang merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara pasangan Ayah Masri dan Ibu Hargianti.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Islamiyah Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2001
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 1 Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2007
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2010.
4. Pada tahun 2010 melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2013.
5. Kemudian pada tahun 2013 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M,Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku pembimbing I dan bapak Budimansyah, M.Kom.I. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh keluargaku, kakak ku Dimas Kurniawan dan Pramudya Irawan, adik ku Yoga Fathasri, keponakanku Keysha Fadli Irawan yang selalu memberi dukungan dan motivasi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada kalian. Amin.
7. Sahabat-sahabat tercinta Evita Meilani, Linda Susanti, Elis Susanti, Endah Suryani, Asra Putri Mustika, yang selama ini menjadi teman terbaik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman club Bola Voly putra dan putri UIN Raden Intan Lampung, terutama Rahmatulliza, Elma Purnamaaini dan Repi Kusuma Ningrum, serta bapak Puji dan bapak Tukirin selaku pelatih yang selama ini memberikan informasi, berbagi keluh kesah dan keceriaan, serta memberiku dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua teman-teman angkatan khususnya prodi Ekonomi Syariah B angkatan 2013 dan teman-teman KKN kelompok 118 yang selalu memberikan semangat serta dukungannya.
10. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak disebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal yang soleh dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis,

IZHARTATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Hipotesis.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Tenaga Kerja.....	20
1. Pengertian Tenaga Kerja	20
2. Penduduk.....	21
3. Status Pekerjaan	25
B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja	27
1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja	27
2. Permintaan Tenaga Kerja	28

3. Penawaran Tenaga Kerja.....	32
4. Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja.....	32
C. Konsep Investasi	35
1. Pengertian Investasi/Penanaman Modal	35
2. Macam-Macam Penanaman Modal.....	35
3. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal	37
4. Faktor Yang Mempengaruhi Investasi	38
5. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	40
D. Konsep Upah Minimum.....	43
1. Pengertian Upah Minimum	44
2. Penggolongan Upah	45
3. Jenis-Jenis Upah.....	46
4. Penetapan Upah Minimum.....	48
5. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	49
E. Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	53
F. Konsep Ekonomi Islam	54
1. Pengertian Ekonomi Islam	54
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	55
3. Nilai-nilai Ekonomi Islam.....	56
4. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	73
B. Jenis dan Sumber Data.....	74
C. Teknik Pengumpulan Data.....	75
D. Populasi dan Sampel	76
E. Definisi Operasional Variabel.....	77
F. Metode Analisis Data.....	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
--	----

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	84
2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	85
B. Analisis Data	88
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	88
2. Hasil Uji Hipotesis	93
3. Hasil Uji Koefesien Determinasi	96
4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	97
C. Pembahasan.....	99
1. Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung	99
2. Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1	Perkembangan Realisasi Proyek PMDN dan PMA di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015	6
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi Lampung Tahun 2011-2015.....	9
1.3	Upah Minimum Kota (UKM) Tenaga Kerja di Kota Bnadar Lampung Tahun 2011-2015	10
2.1	Walikota Bandar Lampung Tahun 1965 – Sekarang	86
2.2	Penduduk Kota Bandar Lampung menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015	87
2.3	Hasil Uji Normalitas	88
2.4	Hasil Uji Multikolinieritas	89
2.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	91
2.6	Hasil Pengujian Uji T.....	93
2.7	Hasil Pengujian Uji F.....	95
2.8	Hasil Uji R Square	96
2.9	Hasil Uji Regresi Berganda.....	97
2.10	Penduduk Yang Bekerja di Kota Bandar Lampung Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2011-2015	104
2.11	Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung Menurut Jam Kerja Tahun 2011-2015	107
2.12	Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung Menurut Status Pekerjaan Tahun 2011-2015	109
2.13	Upah Minimum Kota Dan Kebutuhan Hidup Layak Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015.....	116

DAFTAR GAMBAR

1.1	Kerangka Pemikiran.....	18
1.2	Diagram Ketenagakerjaan.....	25
1.3	Kurva Penentuan (Determinasi) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah oleh Kekuatan-kekuatan Penawaran dan Permintaan	33
2.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	92



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi, oleh karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul **“Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015”**.

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan agar menghindari kesalahpahaman terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.²
2. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.³

² Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung : Alfabeta, 2001), h.7.

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), h.121.

3. Upah Minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.⁴
4. Penyerapan Tenaga Kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.⁵
5. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.⁶
6. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dalam sektor ekonomi memiliki peluang yang besar untuk memantapkan diri

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 71.

⁵ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari*, E-ISSN : 2503-1937, Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1(1), April 2016, h.14.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h.864.

⁷ Hasan Andy, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.11.

menjadi pusat perdagangan, jasa dan perindustrian pada skala Sumatera Bagian Selatan, hal ini pula yang menjadi daya tarik bagi investor yaitu baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya, ada beberapa sektor unggulan investasi di kota ini yaitu industri makanan, hotel dan restoran, industri logam, mesin dan elektronik, serta jasa lainnya. Dapat dikatakan bahwa sektor-sektor inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung.

Semakin meningkatnya investasi dan upah minimum yang ditetapkan diharapkan dapat berdampak pada terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Namun masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung tidak dapat dihindari, yaitu jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin bertambah sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas jumlahnya, sehingga tingkat pengangguran Kota Bandar Lampung cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung.

2. Alasan Subyektif

Peneliti melakukan penelitian ini karena banyak referensi pendukung dari data BPS dan Dinas Tenaga Kerja yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis jalani pada jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Upaya pembangunan NSB (Negara Sedang Berkembang) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Banyak yang beranggapan bahwa hal yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (*trickle down effect*).⁸ Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP) per kapita riil, dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan.

Kecenderungan di atas terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harrod Domar, Atrhur Lewis, W.W Rostow, Hirschman, Rosenstein Rodan, Nurkse, dan Leibenstein. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya mereka sependapat bahwa kata kunci dalam pembangunan adalah *pembentukan modal*. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi.⁹

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan

⁸ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta : Erlangga, 2010), h.4.

⁹ *Ibid.*

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran.¹⁰ Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial-politik yang terjaga.

Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi. Maraknya investasi di suatu negara, tentunya akan membawa beberapa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan.¹¹ Misalnya, terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan nasional Republik Indonesia, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memotivasi masyarakatnya untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya masing-masing sehingga akan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, dengan harapan meningkatnya investasi akan berdampak pada munculnya perusahaan-perusahaan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

¹⁰ Rudi Sofia Sandika, dkk. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*, JOM FEKON 1. No. 2 Oktober 2014, h.3.

¹¹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h.166.

Pelimpahan wewenang tersebut untuk setiap daerah juga membuka kesempatan investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, sebagai pusat perdagangan dan jasa dalam sektor ekonomi Kota Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk memantapkan diri menjadi pusat perdagangan, jasa dan perindustrian pada skala Sumatera Bagian Selatan. Hal ini pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, dengan harapan mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari penanaman modal tersebut, karena melihat Kota Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun semakin berkembang yang ditunjang dengan infrastruktur dan fasilitas perekonomian yang lengkap.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Proyek PMDN dan PMA di Kota Bandar Lampung
Tahun 2011-2015

Tahun	PMDN (Rp.000)		PMA (US \$)	
	Investasi	Jumlah Perusahaan	Investasi	Jumlah Perusahaan
2011	608.170.332.398	42	197.602.721	44
2012	623.170.332.398	43	205.860.101	46
2013	720.850.332.398	45	312.243.578	51
2014	750.430.332.398	59	330.398.578	55
2015	877.285.379.135	64	351.901.799	59

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Data diolah)

Dalam periode 5 tahun terakhir investasi di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel 1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami

peningkatan, pada tahun 2015 mencapai Rp. 877.285.379.135. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, dengan realisasi proyek PMDN pada tahun 2015 mencapai 64 perusahaan dan realisasi proyek PMA mencapai 59 perusahaan. Investasi dalam negeri dan asing di Kota Bandar Lampung lebih banyak disalurkan untuk sektor sekunder dan tersier, daripada sektor primer, dengan jumlah tertinggi yaitu pada sub sektor industri makanan, hotel dan restoran, jasa, serta industri logam, mesin dan elektronik.

Sektor lainnya yang prospektif bagi Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan di Kota Bandar Lampung yang dapat menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Kota Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti perhotelan, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, juga terlihat kecenderungan tumbuhnya kegiatan agroindustri menuju sentra agroindustri andalan di Pulau Sumatera.¹²

Hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai dampak positif dari adanya investasi, diharapkan dengan semakin meningkatnya investasi dalam negeri maupun asing dalam sektor-sektor tersebut dapat membuka kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat pengangguran.

¹² “Kota Yang Prospektif” (On-Line), tersedia di :bandarlampungkota.go.id., (2 Agustus 2017, Pukul :12:00).

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sebesar 197,22 KM² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 sebesar 979.287 jiwa. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk sampai akhir tahun 2015 rata-rata per KM² 4.965 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk, akan mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja ditambah dengan jumlah penduduk yang menganggur namun mencari pekerjaan secara terus-menerus. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tanpa diikuti perluasan dan penciptaan lapangan kerja pada berbagai sektor ekonomi akan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat.¹³ Peningkatan jumlah pengangguran tentu saja akan diikuti dengan meningkatnya jumlah permasalahan sosial yang akan dihadapi bidang ketenagakerjaan. Kondisi ini akan membawa dampak pada tingkat kerawanan sosial, yang selanjutnya berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan ini juga yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin bertambah sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas jumlahnya, sehingga tingkat pengangguran Kota Bandar Lampung cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung.

¹³Dinas Tenaga Kerja, *Profil Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung Tahun 2016* (Bandar Lampung, 2016), h.1.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Lampung, 2011-2015

Kabupaten/Kota		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Lampung Barat	2.84	2.28	2.52	2.18	3.55
2	Kab. Tanggamus	6.08	3.24	4.88	4.60	5.72
3	Kab. Lampung Selatan	8.40	6.10	6.25	6.05	5.38
4	Kab. Lampung Timur	4.83	2.77	5.48	5.00	4.49
5	Kab. Lampung Tengah	3.86	2.64	3.33	2.48	2.94
6	Kab. Lampung Utara	6.53	8.10	7.40	5.57	7.62
7	Kab. Way Kanan	3.49	3.36	4.19	3.35	3.53
8	Kab. Tulang Bawang	6.08	5.59	4.38	4.15	5.29
9	Kab. Pesawaran	7.33	6.62	9.60	8.54	7.27
10	Kab. Pringsewu	7.47	5.98	3.76	3.78	3.85
11	Kab. Mesuji	7.96	4.25	9.51	0.81	5.06
12	Kab. Tulang Bawang Barat	4.28	1.99	3.61	5.13	2.61
13	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-
14	Kota Bandar Lampung	12.09	12.32	10.67	8.29	8.51
15	Kota Metro	11.08	11.48	4.36	4.23	5.12
Lampung		6.38	5.20	5.69	4.79	5.14

Sumber Data : BPS Provinsi Lampung (Data Diolah)

Dapat dilihat dalam tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai tahun 2013 menjadi angka tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali.

Tingginya angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang mencari kerja, dengan kata lain jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja

yang ada. Seharusnya dengan adanya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri maka pemerintah atau pihak swasta dapat mengembangkan usaha atau menambah unit-unit usahanya, dari hal itu maka penambahan modal dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Usaha dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat upah. Menurut Arfida, naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Sementara menurut N. Gregory Mankiw, bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum.

Tabel 1.3
Upah Minimum Kota (UMK) Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung
Tahun 2011-2015

Tahun	Upah Minimum Kota (Rp)
2011	865.000
2012	981.500
2013	1.165.000
2014	1.422.500
2015	1.649.500

Sumber Data : BPS Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Dalam tabel 1.3 terlihat bahwa upah minimum Kota Bandar Lampung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 juga terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 hanya sebesar Rp. 865.000, kemudian pada tahun 2015 telah mencapai Rp. 1.1649.500.

Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bekerja maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual.¹⁴

Pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”.¹⁵ Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya.¹⁶ Anjuran tersebut terdapat dalam Q.S. At Taubah (9) Ayat 105 :

¹⁴ Michael Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip dan Kebijakan Pembangunan*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h.20.

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta : KENCANA, 2015), h.195.

¹⁶ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.50.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At Taubah (9) Ayat:105).*¹⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam Islam sangat menganjurkan bagi setiap individu untuk bekerja, karena dengan bekerja mereka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal dan pekerjaannya.

Di antara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab, hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhdap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁸

Melihat perkembangan investasi dan upah minimum serta masalah ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pengaruh Investasi dan Upah Minimum terhadap

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.273.

¹⁸ Nurul Huda, dkk, *Op. Cit*, h.193.

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015?
2. Bagaimana penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

- a. Pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015.
- b. Penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal praktis dan teoritis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakannya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

1. *“Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kota Kendari”* oleh Kadir, Manat Rahim dan La Ode Suriadi. Data penelitian merupakan data sekunder periode 2009-2013 menggunakan series data, penelitian juga menggunakan data *cross section* 6 kecamatan di Kota Kendari, yaitu: Mandonga, Kandai Barat, Kendari, Puwatu, Abeli, dan Poasia. Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel investasi, dan konsumsi, terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri di Kota Kendari adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel. Dalam penelitian disimpulkan bahwa secara simultan investasi dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Kendari. Secara parsial konsumsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, namun investasi berpengaruh negatif, yang artinya jika terjadi peningkatan investasi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, hal ini di karenakan terjadi pembukaan lapangan kerja baru pada sektor lain,

seperti sektor jasa dan sektor perdagangan, serta di sebabkan pula terjadinya pergeseran jenis industri dari industri padat karya ke industri padat modal.¹⁹

2. *“Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011”* oleh Arifatul Chusna. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series, dengan periode pengamatan tahun 1980-2011 (32 tahun). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertumbuhan sektor industri, investasi, upah sebagai variabel bebasnya dan penyerapan tenaga kerja sektor industri sebagai variabel terikatnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan variabel investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri secara signifikan dan variabel upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, hal ini berarti semakin tinggi rendahnya investasi dan upah mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.²⁰

¹⁹ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Op. Cit.*, h. 12-22.

²⁰ Arifatul Chusna, *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*, Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6889, (Semarang: 2012), h.1-10.

3. *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor”* oleh Eva Dwi Prihartanti. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel upah, investasi, PDRB, jumlah perusahaan industri serta dummy krisis. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder tahunan dari tahun 1994 sampai 2005. Penelitian menggunakan analisis model regresi linier berganda dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Squares*). Diperoleh hasil variabel upah riil memberikan hasil yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan upah riil maka akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Sedangkan Variabel investasi, PDRB, jumlah unit usaha serta dummy krisis memberikan pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel-variabel tersebut, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kota Bogor.²¹
4. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak”* oleh Amin Budiawan. Populasi penelitian yaitu industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak sebanyak 296 unit usaha. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berjumlah 75 unit usaha. Data yang digunakan berupa data primer yang diambil dengan metode angket. Diperoleh hasil uji t bahwa ada pengaruh positif antara

²¹ Eva Dwi Prihartanti, *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor”*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, 2007).

nilai upah terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak, ada pengaruh positif antara nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak, dan modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil pengolahan ikan di Kecamatan Demak. Secara simultan (uji f) variabel upah, modal dan nilai produksi secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya variabel penyerapan tenaga kerja.²²

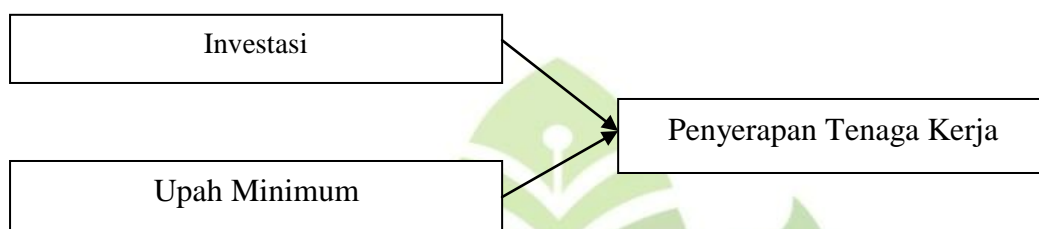
5. *“Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”* oleh Riky Eka Putra. Variabel penelitian adalah nilai investasi, nilai upah, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat. Metode Pengumpulan data diambil dengan metode dokumentasi, angket atau kuesioner dan wawancara. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan dianalisis dengan menggunakan Program SPSS 16 for windows. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R square sebesar 0,777 yang menunjukkan bahwa pengaruh nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja

²² Amin Budiawan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak*, Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6560, (Semarang: 2012), h. 1-8.

industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebesar 77,7 % sedangkan 22,3% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.²³

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.²⁴ Maka dengan mengacu pada latar

²³ Riky Eka Putra, “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, *Economics Development Analysis Journal*, ISSN 2252-6560, (Semarang: 2012), h.1-17.

²⁴ Sugiyono I, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2014) h.93.

belakang masalah, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. H_0 : Investasi dan upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.
2. H_a : Investasi dan upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang kita maksud dengan “*human resources*” di sini ialah penduduk sebagai suatu keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*human power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun.²⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁶ Sedangkan menurut ekonomi Islam, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiran.²⁷

²⁵ Irawan, Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta : BPFE, 2002), h.114.

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2.

²⁷ Afzalur Rahman I, *Economic Doctrines Of Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Utama, 1995), h.248.

2. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Secara sederhana penduduk dikelompokkan menurut Penduduk Usia Kerja (PUK) dan Penduduk di Luar Usia kerja.

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja. Sedangkan Penduduk di Luar Usia Kerja adalah golongan penduduk usia kerja di bawah usia 15 tahun.

Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Mereka adalah kelompok penduduk usia kerja yang selama seminggu lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai cuti dan sejenisnya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/mengharap pekerjaan juga termasuk kategori angkatan kerja.

1) Bekerja

Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.²⁸ Tercakup di dalamnya orang atau sekelompok orang yang meliputi:

- (a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak sedang bekerja atau cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin, belum masa produksi, dan sebagainya).
- (b) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
- (c) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijit, dan sebagainya tetap dikategorikan tetap bekerja, walaupun selama seminggu sebelum pencacahan bekerja kurang dari satu jam.

2) Pengangguran

Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak

²⁸ BPS, *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2015*, Katalog: 23002003.18, h.7.

mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.²⁹

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar.

Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila sudah melakukan “tindakan nyata” seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Atau mereka yang merasa karena situasi/kondisi/iklim/musim tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/sudah mempersiapkan suatu usaha tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

²⁹*Ibid*, h.8.

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:

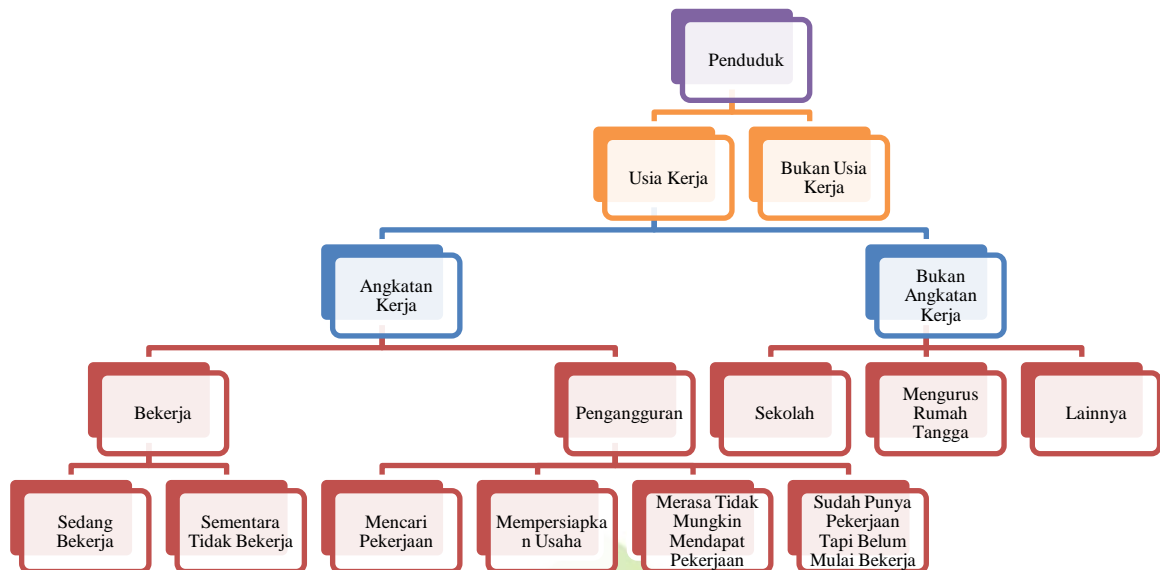
- (a) Setengah penganggur, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- (b) Paruh waktu, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah (yang kegiatannya hanya sekolah), mengurus rumah tangga (yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah), atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lain).³⁰

³⁰*Ibid*, h.6.

Gambar 1.2
Diagram Ketenagakerjaan



3. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha dan menunjukkan tingkat kegiatan yang dilakukannya. Status pekerjaan dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

- Berusaha sendiri, adalah mereka yang bekerja atas resiko sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh: tukang becak.
- Berusaha dengan dibantu oleh anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, adalah mereka yang dalam melakukan usahanya dibantu oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap.
- Berusaha dengan buruh tetap, adalah mereka yang melakukan usahanya dengan mempekerjakan buruh tetap yang dibayar (sering pula diartikan sebagai majikan).

- d. Buruh/karyawan, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi baik pemerintah atau swasta dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- e. Pekerja keluarga, adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

Jumlah orang yang bekerja dengan status (a), (b), (e) digunakan sebagai pendekatan untuk memperkirakan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Sedangkan jumlah orang yang bekerja dengan status (c) dan (d) digunakan untuk pendekatan pada sektor formal.³¹

Pasar kerja di sektor formal dapat disebut juga sebagai pasar kerja primer, di mana ada aturan atau prosedur yang jelas pada mekanisme pasar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Sebaliknya, pasar kerja sekunder hanya menawarkan tingkat upah yang relatif rendah, tidak mempunyai jenjang jabatan (*dead end job*). Banyak pekerja yang masuk ke pasar kerja sekunder tidak pernah dapat masuk ke pasar kerja primer.³²

Pasar kerja primer/formal mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Membutuhkan tingkat kemampuan dan keterampilan yang tinggi
- b. Menawarkan tingkat upah yang relatif tinggi
- c. Kondisi kerja baik

³¹ Dinas Tenaga Kerja, *Op. Cit*, h.13.

³² Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.212.

- d. Tingkat mobilitas tenaga kerja (*turn over*) kecil
- e. Pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang jelas
- f. Mengikuti peraturan-peraturan kepegawaian yang jelas
- g. Ada pedoman kerja tertentu atau manual
- h. Mempunyai kesempatan untuk maju atau naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sedangkan karakteristik dari pasar kerja sekunder/informal adalah sebagai berikut:

- a. Tidak membutuhkan tingkat kemampuan atau keterampilan yang tinggi tetapi lebih diutamakan kemampuan fisik yang baik
- b. Menawarkan tingkat upah yang rendah
- c. Kondisi kerja yang tidak begitu baik
- d. Tingkat mobilitas tenaga kerja tinggi sekali
- e. Tidak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas
- f. Tidak ada peraturan kepegawaian
- g. Tidak mempunyai pedoman kerja
- h. Tidak mempunyai kesempatan untuk maju³³

B. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja

1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang

³³*Ibid.*

tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.³⁴

2. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu.³⁵ Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi.

a. Perubahan Tingkat Upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendah biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal berikut.

- 1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah

³⁴ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Op. Cit*, h.14.

³⁵ Arfida, *Op. Cit*, h.205.

tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau “*scale-effect*”.

- 2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau “*substitution-effect*”.³⁶

b. Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

- 1) Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.³⁷
- 2) Harga barang-barang modal: apabila harga barang-barang modal turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar, karena peningkatan kegiatan perusahaan.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid*, h.206.

Efek kedua yang akan terjadi apabila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modalnya (mesin-mesin), sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi, secara relatif penggunaan tenaga kerjanya adalah berkurang.

Konsep dasar permintaan tenaga kerja seperti yang dikemukakan di atas telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi tenaga kerja dengan menggunakan model-model yang cukup kompleks.³⁸

Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin banyak input pekerja dan modal yang digunakan, semakin besar output yang dihasilkan.³⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa setelah sejumlah pekerja digunakan, output mulai meningkat dengan tambahan yang makin kecil. Keadaan ini merupakan ciri setiap proses produksi dalam jangka pendek. Hasil yang mengecil mempunyai implikasi yang penting bagi analisis ekonomi. Implikasi utamanya adalah bahwa perusahaan hanya mau menggunakan tambahan input pekerja dengan upah yang lebih rendah, karena setelah sejumlah pekerja digunakan, setiap tambahan pekerja akan memberi tambahan output yang lebih kecil.

³⁸ *Ibid*, h.208.

³⁹ Sonny Sumarsono I, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h.17.

Perusahaan mempekerjakan seorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand*. Dalam ekonomi pasar diasumsikan seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga. Perusahaan disebut *price taker*, perusahaan sebagai penerima harga pasar yang berlaku dan tidak dapat merubah harga dengan menaikkan atau menurunkan produksinya. Perusahaan dapat menjual berapa saja produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat dipekerjakannya.⁴⁰

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi, misalnya modal, tenaga listrik, bahan mentah dan lain-lain. Modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha dapat berupa uang atau barang, misalnya mesin-mesin. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dioperasikan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan. Jadi semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap (misal investasi), semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja.⁴¹

⁴⁰*Ibid*, h.18.

⁴¹*Ibid*, h.43.

3. Penawaran Tenaga Kerja

Menurut teori, penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus.⁴² Contohnya, apabila upah sebagai programmer komputer naik relatif lebih tinggi dari upah jenis jabatan lain (karena kebutuhan yang meningkat), maka dapat diduga bahwa tendensi untuk menjadi programmer akan meningkat pula.

Sebetulnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak? Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja relatif cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.⁴³

4. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

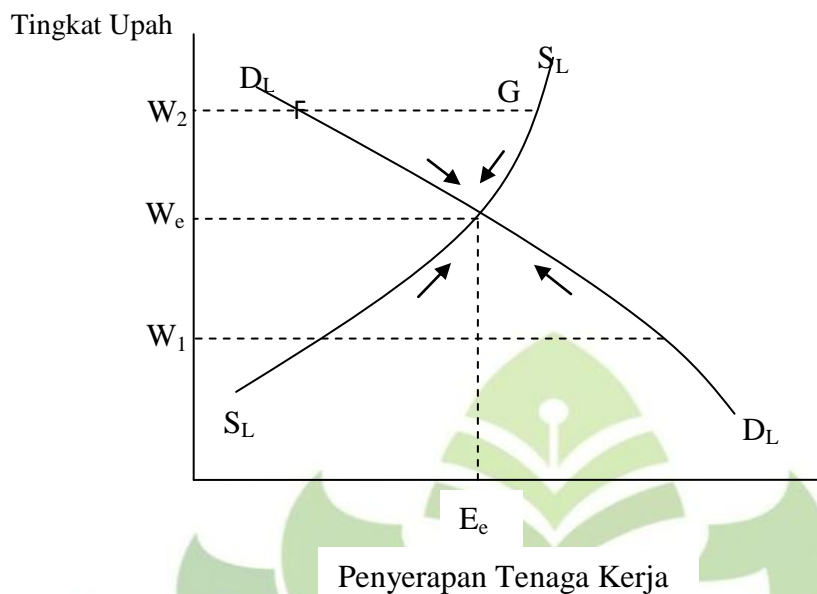
Titik temu (*equilibrium*) antara penawaran dan permintaan tenaga kerja akan terjadi apabila pada tingkat upah tertentu pencari kerja (*supply*) menerima pekerjaan yang ditawarkan kepadanya dan di lain pihak pada

⁴² Arfida, *Op. Cit*, h.208.

⁴³ Arfida, *Op. Cit*, h.209.

tingkat upah tertentu pula pengusaha (*demand*) bersedia mempekerjakan tenaga kerja.

Gambar 1.3
Kurva Penentuan (Determinasi) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Oleh Kekuatan-Kekuatan Penawaran Dan Permintaan



Pada sisi penawaran, setiap individu diasumsikan selalu berpegang teguh pada prinsip maksimalisasi kepuasan (*utility maximization*). Mereka akan membagi waktunya untuk bekerja dan santai berdasarkan kepuasan atau utilitas marginal (*marginal utility*) masing-masing kegiatan itu secara relatif. Kenaikan tingkat upah akan setara dengan kenaikan harga bersantai (biaya oportunitas). Apabila harga sesuatu barang naik, maka kuantitas yang diminta masyarakat akan turun dan diganti dengan barang lain (substitusi). Demikian pula sebaliknya. Jika suatu barang harganya mengalami kenaikan, maka pihak produsen akan segera menaikkan penawarannya. Seandainya tingkat upah naik, maka penawaran dari

“produsen” tenaga kerja (yakni para pekerja itu sendiri) akan meningkat. Motivasi kerja mereka bertambah karena adanya iming-iming upah yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Korelasi tersebut ditunjukkan oleh kemiringan positif (yakni mengarah dari bawah ke atas) atas kurva penawaran tenaga kerja yang termuat dalam Gambar 1.3.⁴⁴

Dari gambar 1.3 dapat kita lihat bahwa hanya pada satu titik saja, yakni yang melambangkan tingkat upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), atau W_e jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh individu (pasar tenaga kerja) sama besarnya dengan yang diminta oleh pengusaha. Pada tingkat upah yang lebih tinggi, seperti pada W_2 penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni W_e . Lalu sebaliknya, pada upah yang lebih rendah, seperti W_1 jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh para produsen dengan sendirinya akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadilah persaingan di antara para pengusaha atau produsen dalam memperebutkan tenaga kerja sehingga hal tersebut akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium, W_e .

Pada titik W_e jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu mendatar atau horizontal adalah sebesar E_e . Secara definitif, pada titik E_e , inilah tercipta kesempatan atau penyerapan kerja secara penuh (*full*

⁴⁴ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kelima, (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2000, h.265.

employment). Artinya, pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan, sehingga sama sekali tidak akan terdapat pengangguran (tentu saja kecuali pengangguran secara sukarela). Dengan demikian, menurut model ini, dalam suatu perekonomian ekuilibrium tradisional yang didasarkan pada upah fleksibel (*flexible wages*) tradisional ini, pengangguran tidak pernah dan tidak akan terjadi.⁴⁵

C. Konsep Investasi

1. Pengertian Investasi/Penanaman Modal

Investasi adalah sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁴⁶ Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁴⁷

2. Macam-macam Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

⁴⁵ *Ibid*, h.266.

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), h.121.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat (1).

- a. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁴⁸

Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah akan berupa diolahnya sumberdaya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.⁴⁹

Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.

- b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁹ Irawan, Suparmoko, *Op. Cit*, h.142.

yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.⁵⁰

3. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁵¹

Jika mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Pada dasarnya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggulirkan program-program investasi yang padat karya yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih berpihak pada pengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan minim

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (2).

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2).

tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang seharusnya diikuti dengan menurunnya pengangguran tidak terjadi.⁵²

4. Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi diantaranya nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan infrastruktur.⁵³

a. Pengaruh Nilai Tukar

Secara teoritis dampak perubahan nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Shikawa, mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala tersebut pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada alokasi modal pada investasi.

⁵² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h.220.

⁵³ Basuki Pujoalwanto, *Op. Cit*, h.168.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan, sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.⁵⁴

b. Pengaruh Tingkat Suku Bunga

Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal lain untuk menghasilkan.

c. Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi, hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Di samping itu, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu

⁵⁴ Basuki Pujoalwanto, *Op. Cit*, h.169.

ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

d. Pengaruh Infrastruktur

Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperlihatkan kecenderungan penurunan tingkat suku bunga.

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

5. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Fungsi Investasi Dalam Perekonomian Islami

Secara lebih spesifik, M.M Metwally mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islami akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol. Ia mengganti

variabel suku bunga dengan *variable expected rate of profit* (r). Penggantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit (*credit market*), dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan *variable expected rate of profit* ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha.

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian Islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.⁵⁵

Islam juga melarang bentuk-bentuk spekulasi yang di dalam perekonomian non Islami (konvensional) tidak terpisahkan, jenis-jenis spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak hanya mencakup perlombaan, permainan kartu dan aktivitas perjudian lainnya, tetapi juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang (*forward transaction*).

Faktor utama lain yang ikut mempengaruhi tingkah laku investasi dalam perekonomian islami adalah ketidakberatan dari suku

⁵⁵ Adiwarman Karim I, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.297.

bunga. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, industri dan lainnya) walaupun pinjaman-pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun publik, pemerintah atau entitas lainnya.

Analisis di atas mengindikasikan bahwa dalam perekonomian Islami, tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi, maka biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari meminjamkan dana yang digunakan untuk kepentingan investasi adalah zakat yang dibayarkan pada dana-dana ini. Dengan kata lain, dana atau tabungan yang tidak termanfaatkan pada investasi riil akan dikenakan zakat pada tingkat tertentu.⁵⁶

Jelaslah bahwa investasi di dalam perekonomian Islami adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan juga bergantung pada bagian relatif dari keuntungan yang dialokasikan antara investor dan mereka yang menyediakan dana-dananya pada bentuk kerja sama atau pinjaman.

b. Tujuan Investasi Dalam Perspektif Islam

Tujuan investasi pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.⁵⁷ Tujuan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

⁵⁶ *Ibid*, h.297.

⁵⁷ Hasan Andy, *Op. Cit*, h.74.

- 2) Memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk.
- 3) Memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.
- 4) Berorientasi pada produksi barang dan jasa yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat manusia termasuk alam dan segala isinya.
- 5) Tidak menggunakan faktor produksi yang melanggar hukum-hukum Allah, baik dalam prosesnya maupun dalam zatnya sehingga outputnya adalah barang halal dan baik (halalan toyeibah).⁵⁸

D. Konsep Upah Minimum

Upah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja, dimana hal ini akan menyebabkan output yang dihasilkan tenaga kerja menjadi lebih baik. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Upah yang diberikan oleh seorang pekerja tergantung pada kemampuan pekerja tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin produktif seorang pekerja maka akan semakin besar upahnya, begitu pula

⁵⁸ Hasan Andy, *Op. Cit*, h.75.

sebaliknya semakin rendah produktivitas seorang pekerja maka akan semakin kecil upah yang dihasilkannya.

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat equilibriumnya. Karena itu, upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan.⁵⁹

Karakteristik pekerja dengan upah minimum antara lain: pekerja dengan upah minimum lebih banyak berjenis kelamin wanita daripada pria, pekerja dengan upah minimum cenderung berusia muda, pekerja dengan upah minimum cenderung kurang berpendidikan, pekerja dengan upah minimum lebih banyak yang bekerja paruh waktu (mereka yang jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam/minggu).⁶⁰

1. Pengertian Upah Minimum

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan

⁵⁹ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 2006), h.161.

⁶⁰ N. Gregory Mankiw, *Op. Cit*, h.162.

karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.⁶¹

Dalam PP Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 dan 42 dijelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

2. Penggolongan Upah

a. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

b. Upah Sistem Hasil (Output)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

⁶¹ Sonny Sumarsono II, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 141.

c. Upah Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.⁶²

3. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie yaitu:⁶³

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan

⁶² Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.* h. 69.

⁶³ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.* h. 70.

hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu:⁶⁴

- 1) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.
- 2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan.
- 3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

⁶⁴Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.* h. 71.

e. Upah yang Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:⁶⁵

- 1) Kondisi perekonomian negara.
- 2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.
- 3) Peraturan perpajakan.
- 4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.
- 5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

4. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.⁶⁶

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

⁶⁵Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.* h. 72.

⁶⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 43-45.

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

5. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasamanya itu.⁶⁷

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi

⁶⁷Afzalur Rahman II, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 365.

kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.⁶⁸ Pembagaian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut ini Q.S. Thaahaa (20) Ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya*”.(Q.S. Thaahaa (20) Ayat 118-119)⁶⁹

Kata “tadzmau” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “tadzmau” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka akan memperoleh makanan dan pakaian yang cukup serta tempat tinggal yang layak. Selain itu anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka.

⁶⁸*Ibid*,h.366.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.444-445.

Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak tertutupi dengan upah tersebut maka akan sangat mempengaruhi efisiensi populasi kerja sehingga akhirnya mempengaruhi kekayaan negara. Di samping itu rasa ketidakpuasan yang timbul di kalangan kelompok pekerja akan melahirkan kebencian dan konflik antara kelompok didalam masyarakat yang betul-betul akan merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat.⁷⁰ Dalam ayat lain di surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara Islam bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya: Q.S. Huud (11) ayat 6:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.....﴾

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya....”. (Q.S. Huud (11) Ayat 6)⁷¹

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya.. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Diriwayatkan Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

⁷⁰ Afzalur Rahman II, *Op. Cit.* h.367.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.298.

“Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya”.

Hadits ini jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu. Dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat minimum dalam suatu masyarakat.⁷²

Setelah negara mampu menetapkan upah minimum untuk pekerjanya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, adapun kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim atau nonmuslim. Pertama, dari upah kerjanya, seraya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaannya, selama pendapatan negara mencukupi. Al-Mawardi dalam *al-ahkam as-sulthaniyah* mengatakan, “penentuan tunjangan disesuaikan kebutuhan, pemberian tunjangan bagi orang yang telah ditetapkan secara rutin (pada zaman itu) tak ubahnya seperti gaji pada zaman kita”⁷³

Setelah pemenuhan kebutuhan bagi semua pekerja negara direalisasikan, negara diberikan peluang (hak) kepada untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari orang-orang yang malas dan

⁷² Afzalur Rahman II, *Op. Cit.* h.368.

⁷³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h.206.

awam.⁷⁴ Ini merupakan salah satu sunatullah di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi (18) Ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”. (Q.S. Al-Kahfi (18) Ayat 30)⁷⁵

E. Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pada umumnya, para ekonom menyepakati bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang.⁷⁶

Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja.⁷⁷ Investasi yang dilakukan dalam rangka penyediaan barang-barang modal seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan hasil output perusahaan akan meningkatkan penyerapan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.406.

⁷⁶ Basuki Pujoalwanto, *Op. Cit.* h.164.

⁷⁷ Sonny Sumarsono I, *Op. Cit.* h.253.

tenaga kerja karena barang-barang modal tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Semakin besar investasi yang dilakukan akan semakin banyak tenaga kerja yang diminta, terutama investasi yang bersifat padat karya. Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja.

Selain investasi, upah juga mempunyai hubungan terhadap penyerapan tenaga kerja. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat equilibriumnya. Karena itu, upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan.⁷⁸

F. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

- a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

⁷⁸ N. Gregory Mankiw, *Loc. Cit.*

- b. Muhammad Abdul Manan (1993), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Qur'an dan Sunnah SAW, ijma dan qiyas.
- d. Muhammad Syauky Al Fanjari dalam at Tariqi (2004), bahwa ekonomi Islam adalah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.
- e. Abdullah Abdul Husain at Tariqi (2004), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta.⁷⁹

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Walaupun pemikiran para pakar ekonomi Islam terbagi kedalam tiga mazhab, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam.

Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (Keimanan), 'Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian),

⁷⁹ Lukman Hakim, *Op. Cit*, h.10.

Khilafah (Pemerintahan), dan Ma'ad (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multiple ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitas.⁸⁰

3. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Rinciannya:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada suatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta semesta dan isinya dan

⁸⁰Adiwarman A.Karim II, *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Keempat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.33-34.

sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan,

manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) keasal-muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “Manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang rasul yang harus diteladani manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Siddiq (benar, jujur)
- 2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan dan kredibilitas)
- 3) Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)
- 4) Tabliq (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran)⁸¹

⁸¹ *Ibid*, h.35-40.

d. Khilafah (Pemerintah)

Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khilafah* di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda “*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya*”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid al-syari’ah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Maqashid al-syariah berasal dari bahasa arab, *maqashid* yang merupakan jamak dari *maqshud* (tujuan atau sasaran). Sehingga secara

terminologi, *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *maqashid* dapat diartikan sebagai “*mashlahah*”. *Maqashid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. *Maqashid syariah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syariah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb.⁸²

Maqashid al-syariah, atau tujuan syariah adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syariah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturan-aturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al Anbiyaa' (21) Ayat 107:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S Al Anbiya (21) Ayat 107).⁸³

⁸² Martini Dwi Pusparini, *Konsep kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Maqashid Asy'syariah)*, Islamic Economics Journal, Volume 1 Nomor 1 Juni 2015, h.51.

⁸³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.461.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (dharuriyah), kesenangan atau kenyamanan (hajiyah), dan kemewahan (tahsiniyah).

1) Kebutuhan Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Merupakan kebutuhan yang essential dan penting. Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang dinilai dari pada keinginan (*want*). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep utility, tapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya, ketika dharuriyyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.

Terpenuhinya kebutuhan dharuriyyat ditandai dengan mempunyai tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang layak pakai, makan tiga kali sehari, mempunyai penghasilan tetap, dan dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yakni nafkah-nafkah pada manusia untuk dapat mewujudkan lima

kebutuhan syari'at yaitu memelihara jiwa, keyakinan atau agama, akal, keturunan dan harta benda. Tanpa kebutuhan primer maka tidak akan berlangsung kebutuhan manusia. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan makanan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman dan pengetahuan.⁸⁴

2) Kebutuhan Hajiyyat (Kebutuhan sekunder)

Kebutuhan al-hajiyyat adalah suatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Hajiyyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia. Seperti adanya aliran listrik, jaringan telephon atau signal, dan akses jalan raya yang baik dengan demikian dapat mempermudah dalam melakukan berbagai macam kegiatan, dalam hal ini untuk mendapatkan akses informasi dan kelancaran transportasi lalu lintas.

3) Kebutuhan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan al-tahsiniyyah dikenal dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan, misalnya menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji.⁸⁵

⁸⁴ Adiwarma Karim III, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007), h.62.

⁸⁵ *Ibid*, h.63.

e. Ma'ad (Hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai “kebangkitan” tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: ”Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.⁸⁶

⁸⁶Adiwarman A.Karim II, *Op. Cit.*, h.41-42.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikembangkan oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.⁸⁷

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Dalam Q.S. Al Balad (90) Ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah"*. (Q.S. Al Balad (90) Ayat 4).

Kabad berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan

⁸⁷ Afzalur Rahman I, *Op. Cit.* h. 248.

menanggung segala kesukaran dan kesusahan dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan.⁸⁸

Manusia harus selalu bekerja keras dan dilarang untuk bermalas-malasan, bahkan hal ini diterangkan di dalam Q.S. Al Insyirah (94) ayat 7 yang berbunyi:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.(Q.S. Al Insyirah (94) Ayat 7)⁸⁹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia harus bekerja, dan ketika telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang dimaksud di sini bukan hanya pekerjaan untuk akhirat seperti beribadah tetapi juga pekerjaan dalam konteks dunia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menganggur dan bermalas-malasan. Karena dengan bekerja maka hidup seseorang akan menjadi lebih makmur, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bahkan mereka dapat memberikan sebagian pendapatan mereka untuk orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya.

Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) secara

⁸⁸ Afzalur Rahman I, *Op. Cit.*, h. 252.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.902.

menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa.⁹⁰ Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, harus ada sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut Islam negara harus menetapkan suatu strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab, hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk melaksanakan strategi tersebut.⁹¹

1. Adanya Kewajiban Memberi Nafkah Bagi Kepala Keluarga (Suami/Bapak)

Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT.

⁹⁰ Nurul Huda, dkk., *Op. Cit.* h.193.

⁹¹ Nurul Huda, dkk., *Op. Cit.* h.194.

Berfirman dalam Q.S. Al Mulk (67) Ayat 15 dan Q.S. Al Jumu'ah (62)

Ayat 10:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al Mulk (67) Ayat 15)”.⁹²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al Jumu'ah (62) Ayat 10).⁹³

Ayat- ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”.⁹⁴

Para ulama menyatakan bahwa wajib bagi negara memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan

⁹² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.823.

⁹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.809.

⁹⁴ Nurul Huda, dkk, *Op. Cit*, h.195.

rakyat sebagaimana telah diterapkan oleh Rasul dan para sahabat, terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.

2. Adanya Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Kerabat Terdekat Dan Ahli Waris.

Islam menganjurkan agar bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, ketika kepala keluarga (suami) tidak mampu lagi secara fisik untuk bekerja, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah (2) Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah (2) Ayat 233)”.⁹⁵

Ayat Al Quran di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maksud “al-waarits” pada ayat tersebut, tidak hanya orang yang telah mendapat warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapat warisan dalam semua keadaan. Rasulullah SAW telah bersabda:

“Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu”
(HR.Ibnu Majah).

3. Kewajiban Menolong Tetangga Terdekat Yang Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok (Pangan) Tetangganya Yang Kelaparan.

Islam sangat mendorong tolong-menolong kepada sesamanya. Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik terhadap sanak keluarga maupun mahramnya, dan ia pun tidak memiliki sanak kerabat atau mahram yang dapat menanggung kebutuhannya, maka kewajiban

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.47.

pemberian nafkah itu beralih kepada negara. Namun sebelum kewajiban tersebut beralih kepada negara, maka Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk menyambung hidup.

Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut.”

(HR. al-Bazzar)

Bantuan tetangga itu tentunya hanya bersifat sementara sampai tetangganya yang diberi bantuan tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang, maka negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁹⁶

4. Negara Secara Langsung Memenuhi Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dari Seluruh Warga Negara Yang Tidak Mampu Dan Membutuhkan.

Menurut Islam negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyalur orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam hal ini, negara akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok

⁹⁶Nurul Huda, dkk, *Op. Cit*, h.196-197.

individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna baik karena mereka telah berusaha, tapi tidak cukup (fakir dan miskin), maupun terhadap orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja, maka negara harus menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Negara dapat saja memberikan nafkah baitulmal tersebut berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban dan diambil oleh negara dari orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At Taubah (9) Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Q.S.At Taubah Ayat 103).⁹⁷

Dalam hal ini negara berkewajiban menutupi kekurangan itu dari harta benda baitulmal (diluar harta zakat) jika harta benda dari zakat tidak mencukupi.

Sebagai utusan (Rasul) Allah, beliau adalah seorang kepala negara dalam sistem kehidupan, yang menjamin kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.⁹⁸ Beliau bersabda:

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.273.

⁹⁸ Nurul Huda, dkk, *Op. Cit*, h, 198.

“Siapa pun orang Mukmin yang mati sedang dia meninggalkan harta, maka wariskanlah hartanya itu kepada keluarganya yang ada. Siapa saja yang mati sedang dia menyisakan utang atau dhaya’an, maka serahkanlah kepadaku. Selanjutnya, aku yang akan menanggungnya” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan itu. Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikianlah, negara harus berbuat sekuat tenaga dengan kemampuannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memungkinkan dinikmati oleh setiap individu yang tidak mampu meraih kemaslahatan itu.

5. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Dan Keamanan)

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah kebutuhan asasi manusia. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” dalam rangka kemaslahatan hidup.⁹⁹

⁹⁹ Nurul Huda, dkk, *Op. Cit*, h.199.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *asosiatif* (hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu investasi dan upah minimum terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

Metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, yaitu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁰⁰

¹⁰⁰Sugiyono I, *Op. Cit.* h.13.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif, sementara data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Data ini dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan sedemikian rupa dan dinyatakan dalam satuan angka.¹⁰¹

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁰² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau pihak yang berhubungan dengan penanaman modal dan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.¹⁰³ Data sekunder yang

¹⁰¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.118.

¹⁰² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁰³ *Ibid*, h. 58.

digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dengan jenis data *time series*. Data bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Tenaga Kerja, perpustakaan, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data yang digunakan adalah Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta Upah Minimum Kota Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰⁴ Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti

¹⁰⁴ Nurul Zairah, *Op. Cit.* h.191.

buku teori, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang memuat teori penelitian serta sumber-sumber pustaka lainnya.

3. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰⁵

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Upah Minimum dan Penduduk 15+ yang Bekerja di Kota Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Upah Minimum dan Penduduk 15+ yang Bekerja di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini

¹⁰⁵ Sugiyono I, *Op. Cit*, h.194.

¹⁰⁶ Sugiyono I, *Op. Cit*, h.115.

¹⁰⁷ Sugiyono I, *Op. Cit* h.116.

adalah *purposive sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰⁸ Adapun alasan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang diterbitkan oleh BPS Kota Bandar Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung hanya tersedia tahun 2005 keatas.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan pendefinisian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel Bebas (X) (*Variabel Independen*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, predictor, antecedent.¹⁰⁹ Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- a. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.¹¹⁰

¹⁰⁸ Sugiyono I, *Op. Cit.* h.392.

¹⁰⁹ Sugiono I, *Op. Cit.* h.59.

¹¹⁰ Sadono Sukirno, *Op, Cit.* h.121.

- b. Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.¹¹¹

2. Variabel Terikat (Y) (*Variabel Dependen*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen.¹¹² Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja, yaitu banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.¹¹³

F. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.¹¹⁴ Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa

¹¹¹ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.* h. 71.

¹¹² Sugiyono I, *Op. Cit.* h.59.

¹¹³ Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi, *Op. Cit.*

¹¹⁴ Duwi Priyatno, *Paham Analisis Data Dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010), h.71.

digunakan adalah statistik *non parametik*. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik *Non-Parametrik Kolmogrov-Smirnov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05.¹¹⁵

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai $tolerance < 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas).¹¹⁶

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memiliki

¹¹⁵ Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.75.

¹¹⁶ Imam Ghazali I, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), h.95-96.

problem autokorelasi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Runs Test*, sebagai bagian dari *statistic non-parametric* dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).¹¹⁷

d. Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Scatter Plot*. Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

2. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji *signifikansi* parameter individual (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/*dependen* secara individu dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar

¹¹⁷Suriyanto, *Op. Cit.* h.116.

0,05 ($\alpha=5\%$).¹¹⁸ Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel *independen* mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent*.¹¹⁹

Kriteria :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti

¹¹⁸ Imam Ghazali III, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2013), h. 98.

¹¹⁹ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹²⁰ Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (investasi dan upah) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).¹²¹ Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yakni pengaruh Investasi (X_1) dan Upah Minimum (X_2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Analisis regresi ganda dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Penyerapan Tenaga Kerja)

X_1 = Variabel Independen (Investasi)

¹²⁰ Imam Ghazali II, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), h.95.

¹²¹ Sugiyono I, *Op. Cit.* h.277.

X_2 = Variabel Independen (Upah)

a = konstanta yaitu (nilai Y bila $X_1, X_2 = 0$)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, social, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industry dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung Pulau Sumatera.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9

kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Walikota Bandar Lampung Tahun 1965-Sekarang

No	Nama	Periode
1	Sumarsono	1956-1957
2	H. Zainal Abidin P.A	1957-1963
3	Alimudin Umar, SH	1963-1969
4	Drs. H.M. Thabrani Daud	1969-1976
5	Drs. Fauzi Saleh	1976-1981
6	Drs. H. Zulkarnain Subing	1981-1986
7	Drs. H.A Nurdin Muhayat	1986-1995
8	Drs. H.Suharto	1996-2006
9	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd.	2006-2010
10	Drs. H. Herman HN, MM	2010 s.d. sekarang

Tabel 2.2
Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total (Jiwa)
2011	450.802	440.572	891.374
2012	456.620	446.265	902.885
2013	475.039	467.000	942.039
2014	493.569	482.101	975.670
2015	493.411	485.876	979.287

Sumber Data: Disnaker Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Pada tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah total penduduk Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, yaitu pada tahun 2011 hanya sebesar 891.374 jiwa, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 979.287 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki dari tahun 2011 sampai tahun 2015 juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu pada tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki sebesar 450.802 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 440.572 jiwa, kemudian pada tahun 2015 penduduk laki-laki mencapai 493.411 jiwa dan penduduk perempuan mencapai 485.876 jiwa.

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data yang diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan normalitas, pengujian ini digunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov*. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogrof-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04184143
Most Extreme Differences	Absolute	.191
	Positive	.177
	Negative	-.191
Kolmogorov-Smirnov Z		.604
Asymp. Sig. (2-tailed)		.859

a. Test distribution is Normal.

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Hasil uji normalitas pada tabel 2.3 di atas dengan menggunakan metode *one sample kolmogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen pada jumlah (N) sebesar 10 adalah 0,859. Berarti data dari penelitian ini

berdistribusi normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,859 > 0,05$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Multikolinieritas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinieritas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada dibawah 10.

Tabel 2.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.104	1.917		5.271	.001		
Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375	.121	8.287
Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791	.121	8.287

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 2.4 menunjukkan bahwa data yang tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga

menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Runs Test*, sebagai bagian dari *statistic non-parametric* dapat pula digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Ho : residual (res_1) random (acak)

Ha : residual (res_1) tidak random (sistematis)

Hasil uji autokorelasi (Uji Runs test) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00325
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	5
Z	-.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

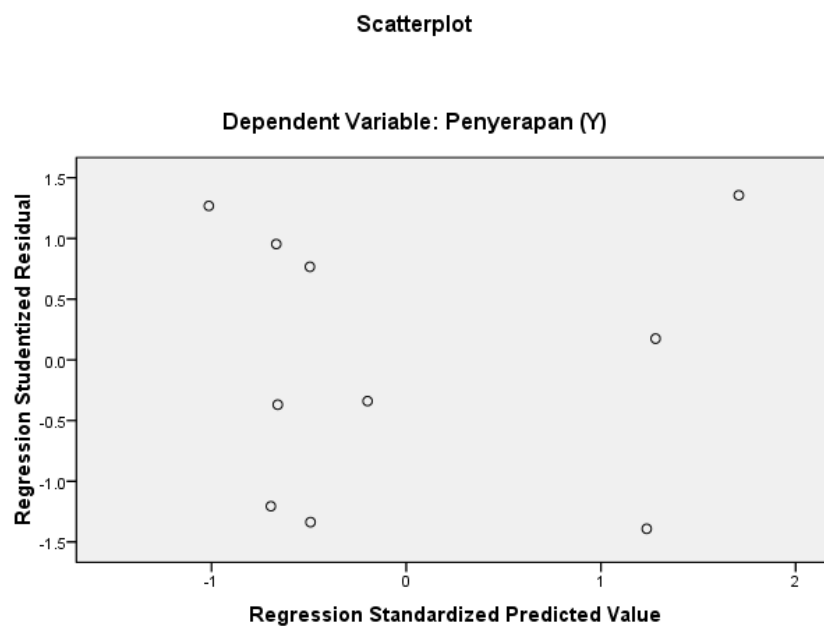
Hasil uji autokorelasi (*Runs Test*) pada tabel 2.5 menunjukkan bahwa nilai test adalah -.00325 dengan probabilitas 0,737 signifikan diatas 0,05 yang berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*,

regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data yang menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas pada gambar 2.1 diperoleh titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah

saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel *independen* mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

Tabel 2.6
Hasil Pengujian Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.104	1.917		5.271	.001
Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375
Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial pada tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa variabel investasi (X1) dengan nilai signifikan $0,375 > 0,05$, dan nilai t hitung $0,948 < t \text{ tabel } 2,365$, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

Sedangkan variabel upah (X2), dengan nilai signifikansi $0,791 > 0,05$, dan nilai t hitung $-0,275 < 2,365$, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah minimum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji f ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung secara bersama-sama. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (0,05).

Tabel 2.7
Hasil Pengujian Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	2	.005	2.010	.204^a
	Residual	.016	7	.002		
	Total	.025	9			

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.7 diketahui hasil uji signifikan simultan (Uji F) di atas menunjukkan nilai sig $0,204 > 0,05$, dan nilai f hitung $2,010 < f$ tabel 4,46. Hal ini menunjukkan:

- 1) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Hipotesis berbunyi:

H_0 : tidak ada pengaruh secara simultan investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja.

H_1 : investasi dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan nilai sig $0,204 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa variabel investasi dan upah minimum tidak ada pengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

Tabel 2.8
Hasil Uji R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604 ^a	.365	.183	.04744

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Dari output model summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,365 (nilai 0,365 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi R, yaitu $0,604 \times 0,604 = 0,365$). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) $0,365 = 36,5\%$, yang artinya adalah besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas dalam hal ini menjelaskan variabel penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 36,5%, sedangkan sisanya 63,5% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung periode tahun 2006-2015.

Tabel 2.9
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.104	1.917		5.271	.001
Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375
Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Sumber : SPSS 16 data diolah tahun 2017

Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 10.104 + 0,110X_1 - 0,032X_2 + e$$

Dimana: a = konstanta = 10.104

X1 = Investasi

b1 = 0,110

$X_2 = \text{Upah Minimum}$

$b_2 = -0,032$

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 10.104, menunjukkan apabila variabel lain mengalami peningkatan 1% maka variabel penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 10.104 %.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi pada variabel investasi bertanda positif sebesar 0,110, menunjukkan apabila variabel investasi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 0,110%. Hasil perhitungan koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Jika jumlah investasi semakin bertambah maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja, dan sebaliknya jika jumlah investasi berkurang maka akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi pada variabel upah minimum bertanda negatif sebesar -0,032, menunjukkan apabila variabel upah minimum mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,032%. Hasil perhitungan koefisien regresi bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja. Jika jumlah upah minimum semakin

bertambah maka akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja, dan sebaliknya jika jumlah upah minimum berkurang maka akan menaikkan jumlah penyerapan tenaga kerja.

B. Pembahasan

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diteliti yaitu dua variabel independen (investasi dan upah minimum) dan satu variabel dependen (penyerapan tenaga kerja) tidak berpengaruh secara simultan, hal ini ditunjukkan dengan Uji F yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, atau nilai signifikansi $0,204 > 0,05$.

1. Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung

a. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel investasi (X_1) sebesar $0,375 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini berarti semakin tinggi atau

rendahnya investasi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis diatas terdapat tidak kesesuaian dengan teori yang ada yaitu yang pertama menurut Basuki Pujoalwanto yang menyebutkan bahwa tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Dengan begitu, tingkat pengangguran bisa direduksi dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sonny Sumarsono yang menyebutkan bahwa permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja.

Tidak berpengaruhnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung ini diduga disebabkan karena investasi di Kota Bandar Lampung baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih banyak disalurkan ke sektor proyek yang padat modal (jasa) dibandingkan ke sektor proyek yang padat karya. Padat modal adalah bisnis yang menggunakan modal dalam jumlah besar, baik modal untuk kegiatan operasional ataupun pengembangan bisnis. Serta teknologi yang digunakan dalam keberlangsungan bisnis juga terbilang canggih dan mutakhir. Sedangkan padat karya adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah besar).

Kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan modal atau mesin.

Penanaman modal asing (PMA) di Kota Bandar Lampung dalam periode 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015 lebih banyak disalurkan ke proyek perusahaan yang termasuk dalam sektor tersier, pada tahun 2015 sektor tersier mencapai 32 proyek perusahaan, dimana sektor tersebut lebih didominasi oleh proyek perusahaan jasa sebanyak 22 proyek perusahaan atau sebesar 62,7% dari keseluruhan total proyek perusahaan selama tahun 2015, pada sektor tersier tersebut proyek perusahaan jasa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan jumlah investasi pada tahun 2011 hanya sebesar 67.507.159 US\$ kemudian pada tahun 2015 mencapai 99.426.942 US\$, kemudian disusul pada proyek hotel dan restoran yang jumlah investasinya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tetap sama yaitu sebesar 15.922.000 US\$, kemudian proyek perdagangan dan reparasi yang hanya mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu jumlah investasinya menjadi 2.259.058 US\$, sedangkan untuk proyek listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi, gudang dan komunikasi jumlah investasinya tetap sama selama tahun 2011 sampai tahun 2015.

Penanaman modal asing (PMA) pada sektor sekunder jumlah investasinya menjadi jumlah terbesar pada tahun 2015 dibandingkan sektor primer dan tersier, namun jumlah proyek perusahaannya lebih kecil daripada sektor tersier selama tahun 2011 sampai tahun 2015,

yaitu contohnya pada tahun 2015 sektor sekunder proyek perusahaannya sebanyak 24 perusahaan, sementara sektor tersier mencapai 32 perusahaan, pada sektor sekunder untuk proyek industri kayu, industri kertas dan percetakan, industri mineral non logam, dan industri logam, mesin dan elektronik jumlah investasinya setiap tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tetap sama atau tidak ada peningkatan, sedangkan untuk proyek industri makanan hanya mengalami peningkatan yang sedikit setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 mengalami peningkatan hanya sebesar 8,08% atau jumlah investasinya menjadi sebesar 153.343.990 US\$, dan jumlahnya tetap sama pada tahun 2015 atau tidak ada peningkatan. Sedangkan untuk proyek industri lainnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 mencapai 24.973.575 US\$. Sementara untuk sektor primer jumlah proyek perusahaannya setiap tahun tetap sama yaitu hanya sebanyak 3 proyek perusahaan dan jumlah investasinya juga tetap sama setiap tahun yaitu sebesar 21.580.137 US\$.

Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2011 sampai tahun 2015 lebih banyak disalurkan ke proyek perusahaan dalam sektor sekunder daripada sektor primer dan tersier, pada tahun 2015 sektor sekunder terdapat 35 proyek perusahaan, sektor tersier 24 proyek perusahaan dan sektor primer hanya 5 perusahaan. Meskipun PMDN proyek perusahaannya lebih banyak

pada sektor sekunder, namun jumlah investasinya yang mengalami peningkatan signifikan adalah pada sektor tersier yang juga didominasi oleh proyek hotel dan restoran serta jasa.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih banyak disalurkan ke proyek perusahaan dalam sektor sekunder, namun jumlah investasinya dalam sektor tersebut dari tahun 2011 sampai tahun 2015 relatif tetap, pada industri kayu, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, dan industri logam, mesin dan elektronik, sedangkan industri makanan meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2014 namun peningkatannya hanya sebesar 3,3%, kemudian jumlahnya tetap pada tahun 2015, sementara industri kimia dan farmasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan hanya sebesar 1,8%, dan pada tahun 2014 meningkat kembali namun hanya sebesar 0,9%, kemudian jumlah investasinya juga tetap pada tahun 2015 yaitu Rp. 108.857.688.000.

Lain halnya investasi dalam sektor tersier, meskipun jumlah proyek perusahaannya pada tahun 2015 hanya mencapai 24 proyek perusahaan namun jumlah investasinya meningkat signifikan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada proyek perdagangan dan reparasi meskipun pada tahun 2011 dan tahun 2012 jumlah investasinya tetap yaitu hanya sebesar Rp. 1.500.000.000, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 97.230.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar 98,4%, kemudian jumlahnya tetap sampai tahun 2015.

Selanjutnya yaitu pada proyek hotel dan restoran yang pada tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah investasinya tetap pada Rp. 42.499.480.000 kemudian meningkat pada tahun 2015 mencapai Rp. 145.354.526.737 atau meningkat sebesar 70,7%, sedangkan proyek perusahaan jasa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 meskipun jumlah investasinya tetap sama namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 12,1% kemudian pada tahun 2015 meningkat kembali sebesar 24,7% atau menjadi Rp. 96.927.990.000. Sementara pada proyek listrik, gas dan air, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri perkantoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 jumlah investasinya tetap sama. Begitu juga pada sektor primer dengan jumlah proyek perusahaan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 hanya terdapat 5 proyek perusahaan dengan jumlah investasinya tetap sama setiap tahun.

Tabel 2.10
Penduduk Yang Bekerja di Kota Bandar Lampung Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

No	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	12.484	7.586	5.434	3.807	16.391
2	Pertambangan	373	1.289	5.251	20.923	1.009
3	Industri	32.799	32.606	38.209	43.797	42.921
4	Listrik Gas Dan Air	546	1.006	2.185	4.642	1.733
5	Bangunan	30.599	27.081	28.252	28.831	42.511
6	Perdagangan	114.724	106.997	117.631	126.498	163.331
7	Angkatan	37.707	30.511	24.102	27.152	29.172
8	Bank/Keuangan	19.643	14.877	13.282	11.599	22.513
9	Jasa	122.120	109.046	114.78	118.177	87.609
	Jumlah	370.995	330.999	354.126	385.425	407.190

Sumber Data: Disnaker Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha seperti yang terlihat dalam tabel 2.10 pada sektor jasa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 justru cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 mencapai 122.120 jiwa, dan pada tahun 2015 turun menjadi 87.609 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 28,2%. Hal ini berarti bahwa meskipun penanaman modal asing (PMA) lebih didominasi pada proyek perusahaan jasa dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang jumlah investinya semakin meningkat pada proyek hotel dan restoran serta jasa, tidak terlalu menyerap banyak tenaga kerja, karena semakin meningkatnya jumlah investasi atau jumlah proyek perusahaan pada sektor tersebut tidak diikuti pula dengan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa. Sementara pada sektor lain contohnya pada sektor industri dan perdagangan jumlah penduduk yang bekerjanya terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor bahwa, pada dasarnya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggulirkan program-program investasi yang padat karya yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja. Bukan lebih berpihak pada pengembangan investasi di sektor (jasa) yang padat modal dan minim tenaga kerja, sehingga pertumbuhan

ekonomi yang seharusnya diikuti dengan menurunnya pengangguran tidak terjadi.

b. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung

Pada variabel upah minimum, dari hasil penelitian diperoleh secara parsial selama tahun 2006-2015 di dapat nilai signifikan untuk variabel upah minimum (X_2) sebesar $0,791 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya upah minimum tidak mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian dengan teori yang ada yaitu menurut N. Gregory Mankiw, yang menyebutkan bahwa bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Sementara menurut Suparmoko, biasanya di kota dibutuhkan tenaga-tenaga yang punya kepandaian atau pendidikan tertentu. Artinya disini bahwa upah minimum kota dapat tidak berpengaruh bagi sebagian besar pekerja karena mereka telah menikmati upah diatas upah

minimum yang telah ditetapkan dan umumnya mereka adalah tenaga kerja yang berpendidikan.

Tabel 2.11
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung Menurut Jam Kerja
Tahun 2011-2015

No	Jam Kerja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	0*)	9.407	3.531	1.531	661	4.137
2	1-9 Jam	4.045	443	56	7	5.513
3	10-24 Jam	28.459	29.559	35.476	42.386	27.027
4	25-34 Jam	30.910	20.395	15.550	11.802	21.808
5	35-44 Jam	107.089	84.075	76.272	68.881	109.717
6	45+ Jam	191.085	192.996	225.240	261.687	238.988
	Jumlah	370.995	330.999	354.125	385.425	407.190

Sumber Data: Disnaker Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Salah satu karakteristik pekerja dengan upah minimum menurut N. Gregory Mankiw adalah pekerja dengan upah minimum lebih banyak yang bekerja paruh waktu (mereka yang jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam/minggu). Berdasarkan peraturan perundang-undangan jumlah jam kerja per minggu adalah sebesar 35-40 jam, sedangkan pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu termasuk dalam kelompok pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Jika dilihat dari karakteristik jam kerja, maka penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dalam tabel 2.11 bahwa yang menjadi pekerja *full time* atau pekerja dengan waktu kerja penuh pada tahun 2011 berjumlah 298.174 jiwa atau sebesar 80,37% dari keseluruhan total pekerja pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2015 jumlah pekerja dengan waktu kerja penuh meningkat menjadi

348.705 jiwa atau sebesar 85,64%. Dengan demikian terdapat 19,63% pekerja paruh waktu/setengah pengangguran pada tahun 2011, dan 14,36 % pada tahun 2015. Hal ini juga mengartikan bahwa penduduk yang bekerja *full time* di Kota Bandar Lampung jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bekerja paruh waktu/setengah pengangguran, yang rata-rata setiap tahunnya pekerja *full time* (waktu kerja penuh) mencapai 80% lebih dari keseluruhan total penduduk yang bekerja.

Kemudian hal lain yang mendukung pernyataan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di Kota Bandar Lampung dapat disebabkan karena penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung jumlahnya lebih besar yang bekerja pada pasar kerja primer/pasar kerja di sektor formal daripada yang bekerja pada pasar kerja sekunder/informal. Dimana pada pasar kerja sektor formal ada aturan atau prosedur yang jelas pada mekanisme pasar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Sebaliknya, pasar kerja sektor informal hanya menawarkan tingkat upah yang relatif rendah, tidak mempunyai jenjang jabatan (*dead end job*).

RADEN INTAN
LAMPUNG

Tabel 2.12
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung Menurut Status
Pekerjaan Tahun 2011-2015

No	Status Pekerjaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Berusaha Sendiri	64.238	47.856	41.630	36.024	70.437
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	26.748	15.888	11.020	7.603	23.740
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	19.415	15.647	14.725	13.784	22.011
4	Buruh/Karyawan/Pekerja Dibayar	208.279	206.597	239.290	275.707	239.953
5	Pekerja Bebas Di Pertanian	2.074	1.501	1.268	1.066	2.154
6	Pekerja Bebas Di Non Pertanian	33.761	24.677	21.062	17.882	24.874
7	Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	16.480	18.833	25.130	33.359	24.021
	Jumlah	370.995	330.999	354.125	385.425	407.190

Sumber Data: Disnaker Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Seperti yang terlihat dalam tabel 2.12 status pekerjaan buruh/karyawan/pekerja yang dibayar dan berusaha dibantu buruh tetap yang termasuk dalam pasar kerja di sektor formal dari tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mereka yang bekerja dalam pasar kerja di sektor informal, yaitu antara lain status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.

Pada status pekerjaan buruh/karyawan/pekerja yang dibayar dan status pekerjaan berusaha dengan buruh tetap termasuk dalam sektor pasar tenaga kerja primer/formal yang mempunyai karakteristik menawarkan tingkat upah yang relatif tinggi dan mengikuti peraturan-peraturan kepegawaian yang jelas, dengan begitu mereka yang terlibat dalam status pekerjaan tersebut sudah sepatutnya memberlakukan

peraturan dari pemerintah dengan menetapkan upah minimumnya bagi karyawan mengikuti upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, bahkan dapat memberlakukan upahnya lebih dari upah minimum karena disesuaikan dari jabatan, pendidikan, maupun skills karyawannya.

Lain halnya dengan mereka yang bekerja pada status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga yang termasuk dalam pasar tenaga kerja sekunder/pasar tenaga kerja informal, yaitu hanya menawarkan tingkat upah yang relatif rendah, tidak mempunyai jenjang jabatan (*dead end job*), yang berarti tidak terikat oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimumnya.

Maka meskipun upah minimum Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan, namun tidak mempengaruhi berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja, karena penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung jumlahnya sebagian besar telah bekerja pada sektor pasar tenaga kerja primer/formal. Dalam tabel 2.12 juga terlihat bahwa penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung cenderung terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 hanya sebesar 370.995 jiwa kemudian pada tahun 2015 mencapai 407.190 jiwa.

2. Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) secara menyeluruh, baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, harus ada sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut Islam negara harus menetapkan suatu strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab, hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam, maka negara lah yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melakukan berbagai upaya sebagai tanggung

jawabnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, upaya tersebut salah satunya dengan semakin ditingkatkannya investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung dengan harapan dengan semakin meningkatnya investasi maka akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

Jika mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, maka negara diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Tujuan dari investasi sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2) yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan tersebut juga sejalan dengan tujuan diadakannya investasi dalam perspektif Islam, yang pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia,

tujuan tersebut diantaranya: membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk, memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.

Realisasi proyek penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2015 mencapai 59 perusahaan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai 64 perusahaan, dengan realisasi proyek penanaman modal asing (PMA) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 untuk sektor primer terdapat 3 perusahaan, sektor sekunder 24 perusahaan dan sektor sekunder sebanyak 32 perusahaan, dimana jumlah investasi tertinggi yaitu pada industri makanan, kedua yaitu hotel dan restoran, dan yang ketiga yaitu industri logam, mesin dan elektronik. Sedangkan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 untuk sektor primer terdapat 5 perusahaan, sektor sekunder 35 perusahaan dan sektor tersier sebanyak 24 perusahaan, dengan jumlah investasi tertinggi juga terdapat pada industri makanan, yang kedua yaitu hotel dan restoran, kemudian yang ketiga yaitu industri kimia dan farmasi.

Investasi yang terealisasi pada berbagai macam lapangan usaha yang ada di Kota Bandar Lampung tersebut adalah bertujuan untuk pengembangan produksi dan menambah pendapatan negara, serta menjadikan masyarakat lebih produktif dengan bekerja, namun daripada

itu Islam tetap menganjurkan kegiatan investasi harus sesuai dan sejalan dengan syariat.

Selain dengan investasi, pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan usaha untuk meningkatkan lebih banyak tenaga kerja yang dapat diserap pasar tenaga kerja yaitu bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta dan program pelatihan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandar Lampung dengan mengadakan pelatihan terhadap para pencari kerja yang kemudian dipertemukan dengan penyedia lowongan pekerjaan, yaitu dengan cara tahap *pertama*, merekrut penduduk usia kerja Kota Bandar Lampung yang masih menganggur melalui Camat di setiap Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja, tahap *kedua* yaitu bidang produktivitas tenaga kerja menempatkan tenaga kerja tersebut untuk mengikuti pelatihan di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung selama 6 bulan, tahap *ketiga* Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengeluarkan Kartu Kuning/Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) untuk para pencari kerja tersebut sebagai legalitas pencari kerja, tahap *keempat* perusahaan yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung wajib melaporkan lowongan pekerjaannya ke Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu sebelum

mengumumkannya ke publik, tahap *kelima* mempertemukan antara pencari kerja hasil pelatihan dengan penyedia lowongan pekerjaan.¹²²

Sementara perspektif ekonomi Islam terhadap penetapan upah minimum adalah negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Diriwayatkan Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

“Berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya danberilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuannya”.

Hadits ini jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu. Dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat minimum dalam suatu masyarakat. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam Q.S. Thaahaa (20) Ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

¹²² Muhammad Kabul S.Sos., Wawancara (Riset) dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker Kota Bandar Lampung, 12 September 2017.

Artinya: *“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”*.(Q.S. Thaahaa (20) Ayat 118-119)

Kata “tadzmau” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “tadzmau” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.

Tabel 2.13
Upah Minimum Kota Dan Kebutuhan Hidup Layak Kota Bandar Lampung
Tahun 2006-2015

Tahun	UMK	KHL
2011	865.000	985.509
2012	981.500	1.022.352
2013	1.165.000	1.195.650
2014	1.422.500	1.530.692
2015	1.649.500	1.649.500

Sumber Data : BPS Kota Bandar Lampung (Data Diolah)

Penetapan upah minimum di Kota Bandar Lampung dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum di Kota Bandar Lampung seperti yang terlihat dalam tabel 2.13 sejak tahun 2011

hingga tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan. Namun pertumbuhan rata-rata upah minimum di Kota Bandar Lampung tahun 2011 hingga tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan kebutuhan hidup layak (KHL). Jika nilai KHL merupakan merupakan nilai kebutuhan minimum untuk seorang pekerja maka upah minimum belum mencapai target minimum berdasarkan nilai KHL pekerja. Artinya upah minimum di Kota Bandar Lampung masih berada di bawah nilai KHL. Pada tahun 2011 KHL Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 985.509, namun upah minimumnya hanya sebesar Rp. 865.000, begitu juga hingga tahun 2014 angka upah minimum masih dibawah angka KHL, kemudian pada tahun 2015 upah minimum Kota Bandar Lampung setara dengan KHL.

Maka hal ini belum sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam bahwa upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hidup pada saat itu dan upah tidak seharusnya jatuh di bawah tingkat minimum dalam suatu masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh investasi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara parsial (Uji T) diketahui nilai signifikan untuk variabel investasi (X1) sebesar $0,375 > 0,05$, nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung disebabkan karena investasi di Kota Bandar Lampung baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih banyak disalurkan ke sektor proyek padat modal (jasa) dibandingkan ke sektor proyek padat karya, dimana dalam sektor proyek padat modal hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk variabel upah minimum dari hasil penelitian secara parsial (Uji T) diketahui nilai signifikan untuk variabel upah minimum (X2) sebesar $0,791 > 0,05$, nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan

terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung. Tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung disebabkan karena penduduk yang bekerja *full time* (waktu kerja penuh) di Kota Bandar Lampung jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bekerja paruh waktu/setengah pengangguran, serta penduduk yang bekerja di Kota Bandar Lampung jumlah terbesar telah bekerja pada status pekerjaan yang masuk dalam pasar tenaga kerja primer/formal, dimana karakteristik penduduk yang telah bekerja *full time* (waktu kerja penuh) dan yang masuk dalam pasar tenaga kerja formal adalah menerima tingkat upah yang relatif tinggi dan mengikuti peraturan-peraturan kepegawaian yang jelas.

2. Penyerapan tenaga kerja di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam adalah pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya sebagai tanggung jawabnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, upaya tersebut salah satunya dengan semakin ditingkatkannya investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena pada hakekatnya tujuan investasi adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia, serta upaya lainnya yang telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung adalah bekerja sama dengan

lembaga pelatihan kerja swasta dan program pelatihan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandar Lampung dengan mengadakan pelatihan terhadap para pencari kerja yang kemudian dipertemukan dengan penyedia lowongan pekerjaan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan realisasi proyek penanaman modal baik PMA maupun PMDN lebih ditujukan ke sektor-sektor perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, daripada lebih ditujukan ke sektor proyek yang padat modal (jasa) yang minim menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung dapat berkurang. Serta dalam menentukan upah minimum untuk pekerja seharusnya lebih ditingkatkan karena kebutuhan hidup layak di Kota Bandar Lampung juga semakin meningkat.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun, maka penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy, Hasan, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- BPS, *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2015*, Katalog: 23002003.18.
- Budiawan, Amin. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak*. Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6560. Semarang: 2012.
- Chusna, Arifatul. *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*. Economics Development Analysis Journal. ISSN 2252-6889. Semarang: 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dinas Tenaga Kerja, *Profil Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung Tahun 2016* (Bandar Lampung, 2016)
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 5, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011
- , *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang : UNDIP, 2013.
- , *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : KENCANA, 2015
- Irawan, Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta : BPFE, 2002.

Kabul, Muhammad, Wawancara (Riset) dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker Kota Bandar Lampung, 12 September 2017.

Kadir, Manat Rahim, La Ode Suriadi. *Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Kota Kendari*, E-ISSN : 2503-1937. Jurnal Ekonomi (JE) Vol.1(1). April 2016.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islami* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.

-----, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

-----, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Kota Yang Prospektif” (On-Line), tersedia di : bandarlampungkota.go.id., (2 Agustus 2017, Pukul :12:00).

Kuncoro, Mudrajad, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* Jakarta : Erlangga, 2010

Mankiw, N. Gregory, *Makroekonomi* Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, 2006.

Noor, Juliansah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Nurhayati, Siti -Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan.

Prihartanti, Eva Dwi. “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kota Bogor*”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor. 2007.

Priyatno, Duwi, *Paham Analisis Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2010.

Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Pusparini, Martini Dwi. *Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Maqashid Asy'syariah)*. Islamic Economics Journal. Volume 1 Nomor 1 Juni 2015.

Riky Eka Putra, “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6560, Semarang: 2012.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Economic Doctrines of Islam*, Terjemahkan Soeroyo, dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Sandika, Rudi Sofia, dkk. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*, JOM FEKON 1. No. 2 Oktober 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2014

-----. *Penelitian Administratif*, Bandung : Alfabeta, 2001.

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000.

Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

-----. *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

Suriyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011.

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.

Todaro, Michael, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip dan Kebijakan Pembangunan*, Edisi Ketiga, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

-----, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Zairah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.



1. Jumlah PMA Dan PMDN Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015

Tahun	PMA (US\$)	Kurs Tengah (Rp.)	PMDN (Rp)
2006	155.930.708	9.020	452.045.591.000
2007	165.957.060	9.419	531.492.833.000
2008	177.357.060	10.950	556.523.483.000
2009	190.457.060	9.400	577.284.783.000
2010	193.925.821	8.991	577.284.783.000
2011	197.602.721	9.068	608.170.332.398
2012	205.860.101	9.670	623.170.332.398
2013	312.243.578	12.189	720.850.332.398
2014	330.398.578	12.440	750.430.332.398
2015	351.901.799	13.795	887.285.379.135

2. Upah Minimum Kota Dan Penduduk 15+ Yang Bekerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015

UMK	Penduduk 15+ Bekerja
510.000	374.115
560.500	342.334
627.500	360.313
700.000	374.261
776.500	374.664
865.000	354.744
981.500	344.714
1.165.000	361.957
1.422.500	385.417
1.649.500	407.190

3. Hasil Ln Investasi, Upah Minimum dan Penduduk 15+ Yang Bekerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015

Tahun	Log Investasi	Log UMK	Log Penduduk 15+ Bekerja
2006	28.25081266	13.142166	12.83231852
2007	28.37040395	13.23658452	12.74354215
2008	28.546745	13.34949895	12.79472838
2009	28.49288994	13.45883561	12.83270869
2010	28.47296402	13.56255192	12.8337849
2011	28.50650311	13.67048479	12.77915168
2012	28.59184057	13.79683729	12.75047037
2013	29.1410336	13.96823164	12.7992807
2014	29.21218067	14.16792644	12.86208114
2015	29.37878876	14.31598277	12.91703519

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04184143
Most Extreme Differences	Absolute	.191
	Positive	.177
	Negative	-.191
Kolmogorov-Smirnov Z		.604
Asymp. Sig. (2-tailed)		.859

a. Test distribution is Normal.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.104	1.917		5.271	.001		
Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375	.121	8.287
Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791	.121	8.287

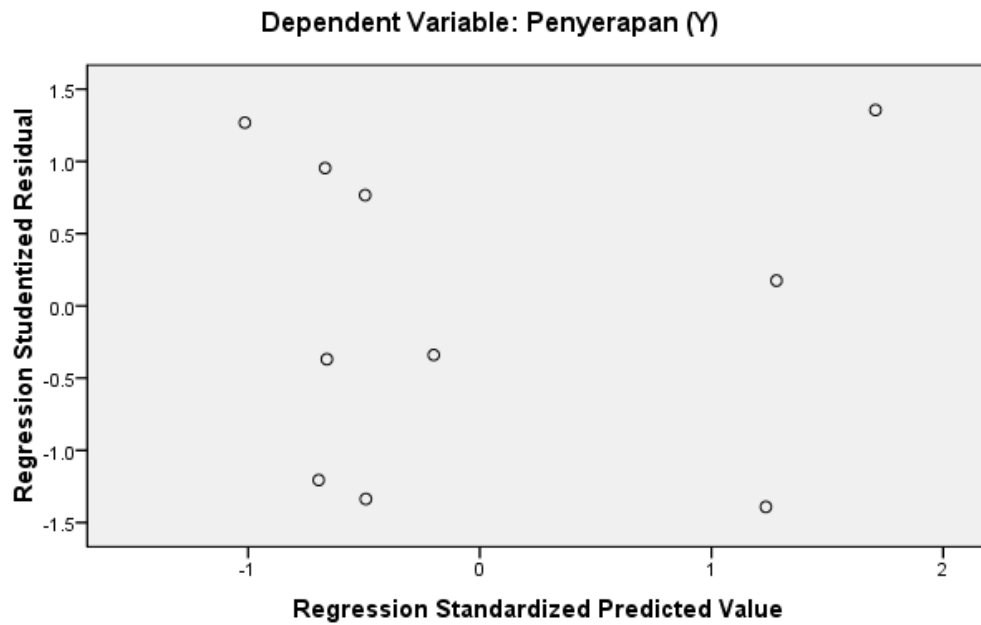
a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00325
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	5
Z	-.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Scatterplot



Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyerapan (Y)	12.8145	.05250	10
Investasi (X1)	28.6964	.39369	10
Upah (X2)	13.6669	.39377	10

Correlations

		Penyerapan (Y)	Investasi (X1)	Upah (X2)
Pearson Correlation	Penyerapan (Y)	1.000	.598	.532
	Investasi (X1)	.598	1.000	.938
	Upah (X2)	.532	.938	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyerapan (Y)	.	.034	.057
	Investasi (X1)	.034	.	.000
	Upah (X2)	.057	.000	.
N	Penyerapan (Y)	10	10	10
	Investasi (X1)	10	10	10
	Upah (X2)	10	10	10

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Upah (X2), Investasi (X1) ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.604 ^a	.365	.183	.04744	1.460

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	2	.005	2.010	.204 ^a
	Residual	.016	7	.002		
	Total	.025	9			

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.104	1.917		5.271	.001		
	Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375	.121	8.287
	Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791	.121	8.287

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimen sion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Investasi (X1)	Upah (X2)
1	1	3.000	1.000	.00	.00	.00
	2	.000	89.459	.08	.00	.13
	3	1.357E-5	470.141	.92	1.00	.87

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

RADEN INTAN
LAMPUNG

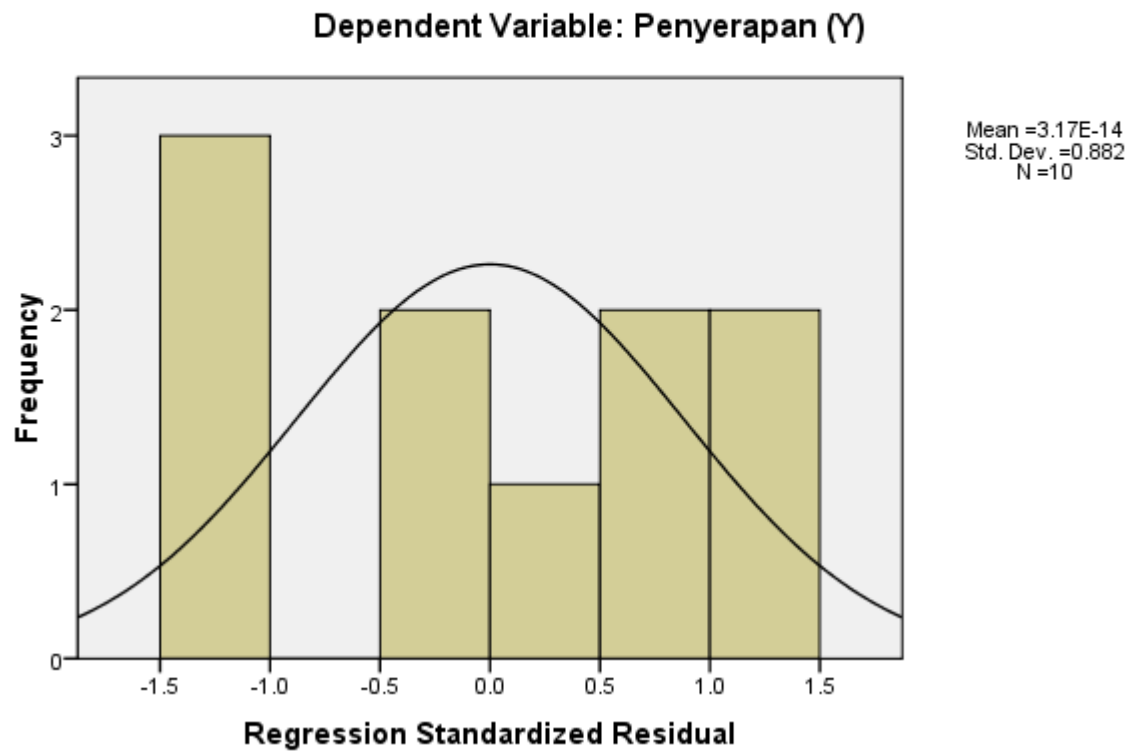
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	12.7824	12.8687	12.8145	.03171	10
Std. Predicted Value	-1.014	1.708	.000	1.000	10
Standard Error of Predicted Value	.017	.031	.026	.004	10
Adjusted Predicted Value	12.7599	12.8794	12.8158	.03477	10
Residual	-.05438	.04996	.00000	.04184	10
Std. Residual	-1.146	1.053	.000	.882	10
Stud. Residual	-1.391	1.356	-.012	1.075	10
Deleted Residual	-.08303	.08551	-.00131	.06266	10
Stud. Deleted Residual	-1.514	1.461	-.022	1.132	10
Mahal. Distance	.283	3.009	1.800	.804	10
Cook's Distance	.004	.470	.177	.176	10
Centered Leverage Value	.031	.334	.200	.089	10

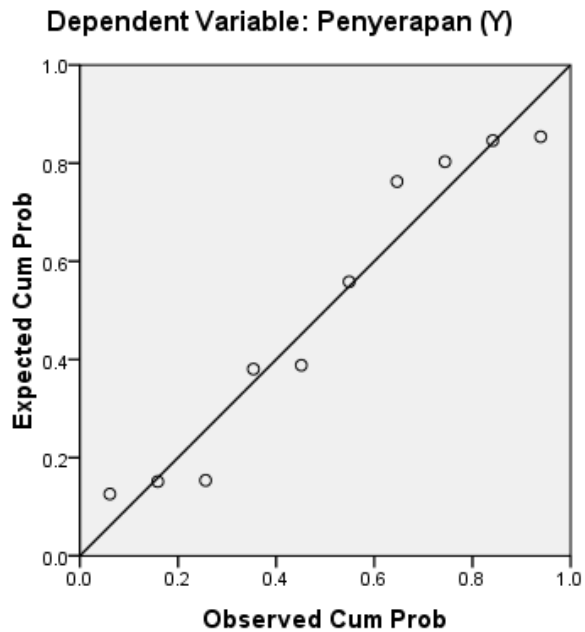
a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)



Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



5. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.104	1.917		5.271	.001
Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375
Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)

6. Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	2	.005	2.010	.204^a
	Residual	.016	7	.002		
	Total	.025	9			

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

7. Hasil Uji Koefesien Determinasi (R Square)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604 ^a	.365	.183	.04744

a. Predictors: (Constant), Upah (X2), Investasi (X1)

8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.104	1.917		5.271	.001
	Investasi (X1)	.110	.116	.822	.948	.375
	Upah (X2)	-.032	.116	-.239	-.275	.791

a. Dependent Variable: Penyerapan (Y)